

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016**

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Rencana stratejik merupakan alat bagi manajemen

untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2011-2016.

Tahun 2011 merupakan masa transisi dari penyelenggaraan pemerintahan yang perencanaannya berdasarkan RPJMD 2006-2011 (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007), dengan RPJMD 2011-2016 (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011). Namun demikian target kinerja tahun 2011 sudah disesuaikan dengan target kinerja pada dua RPJMD dimaksud

## **A. VISI**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi

merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA “**

Makna dari visi tersebut adalah :

- MASYARAKAT** : Merupakan sekelompok orang yang hidup bersama
- PACITAN** di Kabupaten Pacitan dalam satu komunitas yang teratur
- SEJAHTERA** : Adalah tatanan kehidupan masyarakat pacitan yang terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi antara lain di tandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan daya beli masyarakat, hal tersebut selaras visi RPJMN dan RPJM Provinsi Jawa Timur

## **B. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang

harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Pemerintah Kabupaten Pacitan dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Masyarakat Pacitan Sejahtera”**, maka ditetapkan misi Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. **Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik;**
2. **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;**
3. **Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat ;**
4. **Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan;**
5. **Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar**

**6. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama**

Makna dari misi tersebut adalah :

**Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik**

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

**Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak dasar rakyat untuk memperoleh akses kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

**Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses

masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas prestasi anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar.

**Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan**

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, komponen standar hidup layak diukur dengan indikator PDRB per kapita riil yang telah disesuaikan. Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah sementara ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah kabupaten ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

Perkembangan perekonomian daerah diukur dengan menggunakan tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang dihitung

berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini dapat digunakan untuk mengukur intensitas kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan.

**Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar**

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang atau jasa berupa jalan, jembatan, pasar, informasi dan telekomunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur irigasi sebagai penunjang produksi pertanian, penyediaan air bersih maupun listrik guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

**Misi 6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

### **C.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pacitan serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan ada 9, yaitu :

1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional
2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan
3. Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
5. Mempermudah akses pendidikan
6. Meningkatkan kualitas pendidikan
7. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah



8. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar
9. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai

## **C.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Pacitan ada 19 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis
2. Tercapainya SPM daerah
3. Terselenggaranya Pelayanan Prima
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)
5. Terwujudnya perilaku hidup sehat
6. Terciptanya lingkungan sehat
7. Meningkatnya pelayanan kesehatan
8. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
9. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
10. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau

11. Meningkatnya pelayanan pendidikan
12. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah
13. Ketersediaan pangan daerah
14. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing
15. Pemasaran komoditas daerah
16. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian
17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar
18. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai
19. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat.

## **D. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN**

### **D.1. Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut

menciptakan nilai (*strategy objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategis" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan di evaluasi (*learning process*).

Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016, sebagai berikut:

1. Strategi profesional birokrasi

Profesional birokrasi sekarang ini menjadi tuntutan setiap pemerintah daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih profesional, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pelayanan pemerintah yang telah menerapkan Standar Operational Prosedure (SOP).

Strategi profesional birokrasi, untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis;
- b. Tercapainya SPM daerah;
- c. Terselenggaranya pelayanan prima; dan
- d. Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)

2. Strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga

Akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga merupakan wujud masyarakat sehat yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dasar.

Strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga, untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perilaku hidup sehat;
- b. Terciptanya lingkungan sehat;
- c. Meningkatnya pelayanan kesehatan; dan
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.

3. Strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi siswa

Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi siswa diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbaiki sistem pendidikan yang lebih berkualitas, infrastruktur pendidikan yang layak dan tenaga pengajar yang kompeten.

Strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi siswa, untuk mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau; dan
- c. Meningkatnya pelayanan pendidikan

4. Strategi pengembangan ekonomi kerakyatan

Pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan basis utama dalam pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Pacitan sebagian besar

masyarakatnya bekerja pada sektor informal yang ditandai dengan banyaknya jumlah UMKM yaitu sebesar 11.126. Pengembangan ekonomi kerakyatan juga diharapkan mampu menciptakan peluang pasar regional, nasional maupun internasional bagi produk-produk unggulan UMKM di Kabupaten Pacitan.

Strategi pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah;
  - b. Ketersediaan pangan daerah;
  - c. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing; dan
  - d. Pemasaran komoditas daerah.
5. Strategi pemantapan daya dukung infrastruktur pembangunan daerah
- Infrastruktur merupakan komponen penting sebagai penunjang roda penggerak perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, disamping merupakan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Infrastruktur memegang peranan yang sangat penting, mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Strategi pemantapan daya dukung infrastruktur pembangunan daerah untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian;

- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar.

6. Strategi penguatan jati diri masyarakat

Penguatan jati diri masyarakat merupakan penguatan akar budaya tatanan sosial kemasyarakatan yang telah tertanam dari generasi sebelumnya, masyarakat yang berbudaya akan dapat menjadikan lingkungan kemasyarakatan yang damai, beradab dan berprestasi.

Strategi menumbuh kembangkan penguatan jati diri masyarakat untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai;  
dan
- b. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat.

**D.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Kabupaten Pacitan merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan

dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Kabupaten Pacitan disusun sebagai berikut :

**a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2012)**

Pada tahap I pembangunan diarahkan untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, peningkatan profesionalisme, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pusat ekonomi unggulan, peningkatan aksesibilitas infrastruktur kesehatan serta infrastruktur dasar lainnya.

**b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2013)**

Pada tahap II diarahkan untuk pemenuhan SPM daerah, peningkatan pelayanan prima, pemberdayaan perilaku hidup sehat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar. Pada tahap ke II juga terus melanjutkan fokus pembangunan tahun 2012 yang belum tercapai dan harus diselesaikan pada tahun 2013.

**c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2014)**

Pada tahap III fokus pembangunan mewujudkan lingkungan sehat, perbaikan layanan kesehatan, pemenuhan pendidikan terjangkau bagi seluruh masyarakat, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan koperasi. Pada tahap III juga terus melanjutkan fokus pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun 2014.

**d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2015)**

Pada tahap IV pembangunan difokuskan pada penciptaan sistem distribusi dan pemasaran komoditas unggulan, serta penguatan tatanan sosial masyarakat. Tahap IV juga terus melanjutkan fokus pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun 2015.

**e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2016)**

Pada tahap V merupakan tahap terakhir periode kepemimpinan bupati, sehingga pada tahap ini diharapkan visi dan misi bupati dapat tercapai. Pada tahun 2016 fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat rukun dan damai. Pada tahap V juga terus melanjutkan fokus pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercapai. Pada tahap terakhir ini diharapkan semua target yang telah direncanakan dapat tercapai secara keseluruhan.

**D.3. Kebijakan Umum**

kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, maka kebijakan umum Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:



**1. Kebijakan umum untuk strategi profesional birokrasi**

Dengan adanya profesional birokrasi diharapkan tata kelola pemerintah Kabupaten Pacitan dapat mengelola tata pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan diklat teknis maupun fungsional serta pemberian hak-hak pegawai sesuai ketentuan;
- b. Perencanaan dan pengendalian SPM;
- c. Pengembangan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;

**2. Kebijakan umum untuk strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga**

Akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga untuk mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dasar.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Peningkatan akses, dan prasarana pelayanan kesehatan;
- c. Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau.

**3. Kebijakan umum untuk strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi siswa**

Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbaiki sistem yang lebih berkualitas, dukungan infrastruktur yang layak dan tenaga pengajar yang kompeten.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang terjangkau;
- c. Peningkatan kualitas pendidikan semua jenjang dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

**4. Kebijakan umum untuk strategi pengembangan ekonomi kerakyatan**

Pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengembangan ekonomi unggulan daerah;
- b. Pengembangan kawasan ekonomi unggulan;
- c. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan;
- d. Pengembangan koperasi, industri kecil, dan UKM berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG);

- e. Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran hasil-hasil produksi.

#### **5. Kebijakan umum untuk strategi daya dukung infrastruktur pembangunan daerah**

Infrastruktur merupakan dasar bagi perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Infrastruktur yang baik akan memegang peranan penting sebagai penggerak roda mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan listrik masuk desa dengan memprioritaskan desa yang belum ada sambungan listrik;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, sentra perekonomian, pendidikan dan kesehatan;
- c. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

#### **6. Kebijakan umum untuk strategi penguatan jati diri masyarakat**

Penguatan jati diri masyarakat akan menjadikan penguatan akar budaya dan tatanan sosial kemasyarakatan yang telah tertanam dari generasi sebelumnya, masyarakat yang berbudaya akan menjadikan lingkungan kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan damai, beradab dan berprestasi.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya;
- b. Peningkatan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal;  
dan
- c. Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

#### **D.4. Program**

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berangkat dari agenda pembangunan daerah Kabupaten Pacitan serta rumusan program pembangunan daerah telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2006-2011 adalah sebanyak 170 program dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program pembangunan daerah pada strategi profesional birokrasi.**

Program pembangunan daerah ini akan memfokuskan pada beberapa program antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4. Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM
5. Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
11. Program perencanaan pembangunan daerah

**b. Program pembangunan daerah pada strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga.**

Program pembangunan daerah ini akan memfokuskan pada beberapa program antara lain:

1. Program pengembangan lingkungan sehat
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

**c. Program pembangunan daerah pada strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi siswa.**

Program pembangunan daerah ini akan memfokuskan pada beberapa program antara lain:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

**d. Program pembangunan daerah pada strategi pengembangan ekonomi kerakyatan.**

Program pembangunan daerah ini akan memfokuskan pada beberapa program antara lain:

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
  6. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
  8. Program pengembangan budidaya perikanan
  9. Program pengembangan perikanan tangkap
  10. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
  11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  13. Program kerjasama pembangunan
- e. Program pembangunan daerah pada strategi daya dukung infrastruktur pembangunan daerah.**

Program pembangunan daerah ini akan memfokuskan pada beberapa program antara lain:

1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
5. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
8. Pemberdayaan komunitas perumahan
9. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

**f. Program pembangunan daerah pada strategi penguatan jati diri masyarakat.**

Program pembangunan daerah ini akan memfokuskan pada beberapa program antara lain:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja



## **E. RENCANA KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan 141 (seratus empat puluh satu) program, 19 (sembilan belas) sasaran dengan 291 (dua ratus sembilan puluh satu) indikator kinerja utama. Kesemuanya terinci dan akan dicapai melalui 618 kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebesar Rp.889.210.050.158,77.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016 target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2011 diuraikan per sasaran sebagai berikut :

**Tabel II.1.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 1**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SKPD
1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	3,31	BKD
		2	PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti/th/jenis diklat (%)	353	BKD/DIKLAT
		3	Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan	106	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOK
		4	Aparatur yang dilatih tata pemerintahan desa (%)	71,69	BAPEMAS & PEMDES
		5	Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu (%)	1,41	BKD

**Tabel II.2.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 2**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SKPD
2	Tercapainya SPM daerah	1	SPM yang diterapkan (%)	13	SETDA
		2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,71	DINAS DUKCAPIL
		3	Bayi berakte kelahiran(%)	97	DINAS DUKCAPIL
		4	Pasangan berakte nikah(%)	100	DINAS DUKCAPIL
		5	Kepemilikan KTP (%)	71,1	DINAS DUKCAPIL
		6	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	64,79	DINAS DUKCAPIL
		7	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	85,88	DINAS DUKCAPIL
		8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	DINAS DUKCAPIL
		9	SKPD yang mencapai target SPM %	13	SETDA

**Tabel II.3.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 3**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	1 SKPD yang menerapkan SOP (%)	65	SETDA
		2 Lama proses perijinan	5,42	KPP
		3 Jumlah pertambahan tanpa ijin	22	DINAS TAMBEN
		4 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	68,78	DINAS CKTK
		5 Luas lahan bersertifikat (%)	26,16	SETDA
		6 Penyelesaian izin lokasi	4	KPP
		7 Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	ada	KPP
		8 Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman (%)	75,9	BAPEMAS & PEMDES
		9 Desa dengan administrasi baik (%)	71,69	BAPEMAS & PEMDES
		10 Jumlah SKPD dan Desa Pengelolaan arsip secara baku	81	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOK
		11 Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	INSPEKTORAT
		12 Penyelesaian kasus tanah Negara	0	SETDA
		13 Indeks Kepuasan Masyarakat	ada/baik	SETDA
		14 Jumlah pelayanan berstandar internasional (ISO)	5	SETDA

**Tabel II.4.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 4**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
4	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	1 Pelanggaran disiplin PNS (%)	0,0014	BKD
		2 Jumlah SKPD yang menerapkan e-government	18	SETDA
		3 Sistem Informasi Manajemen Pemda	4	SETDA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		4 Web site milik pemerintah daerah	ada	SETDA
		5 Opini audit BPK	WTP	DPPKA
		6 Peraturan daerah yang melibatkan partisipasi stakeholders %	100	SETDA
		7 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	BAPPEDA & PM
		8 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	BAPPEDA & PM
		9 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	BAPPEDA & PM
		10 Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	BAPPEDA & PM

**Tabel II.5.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 5**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
5	Terwujudnya perilaku hidup sehat	1 Penduduk yang menggunakan jamban (%)	77,5	DINAS KESEHATAN
		2 Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	67,5	DINAS KESEHATAN
		3 Angka Usia Harapan Hidup	70,9	DINAS KESEHATAN

**Tabel II.6.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 6**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
6	Terciptanya lingkungan sehat	1 Rumah layak huni (%)	88,12	DINAS CKTK
		2 Jumlah rumah layak huni	120.052	DINAS CKTK
		3 Rumah bersanitasi (%)	77,93	DINAS CKTK
		4 Jumlah rumah berjamban	105.518	DINAS KESEHATAN
		5 Pencemaran status mutu air (%)	50	KANTOR LH

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		6 Penanganan sampah (%)	87,58	KANTOR LH
		7 Desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	51	DINAS KESEHATAN
		8 Jumlah pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat	4	DINAS KESEHATAN

**Tabel II.7.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 7**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
7	Meningkatnya pelayanan kesehatan	1 Rasio dokter per satuan penduduk (‰)	0,17	DINAS KESEHATAN
		2 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (‰)	0,88	DINAS KESEHATAN
		3 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12	DINAS KESEHATAN
		4 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	128	DINAS KESEHATAN
		5 Kunjungan puskesmas/visit rate (%)	60	DINAS KESEHATAN
		6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(%)	22	DINAS KESEHATAN
		7 Penderita DBD yang ditangani (%)	100	DINAS KESEHATAN
		8 Cakupan puskesmas (%)	200	DINAS KESEHATAN
		9 Cakupan puskesmas pembantu (%)	32,16	DINAS KESEHATAN
		10 Cakupan kunjungan bayi(%)	90	DINAS KESEHATAN
		11 Angka kesakitan malaria per 1000(‰)	<1	DINAS KESEHATAN
		12 Cakupan pelayanan anak balita (%)	90	DINAS KESEHATAN
		13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)(%)	72	DINAS KESEHATAN
		14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	DINAS KESEHATAN
		15 Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	0,6	DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		16 Posyandu aktif(%)	46	BAPEMAS & PEMDES
		17 Cakupan kunjungan ibu hamil k-4 (%)	90	DINAS KESEHATAN
		18 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan(%)	95	DINAS KESEHATAN
		19 Klien yang mendapatkan penanganan HIV -AIDS (%)	100	DINAS KESEHATAN
		20 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin(%)	56	DINAS KESEHATAN
		21 Pasien Gakin yang dilayani Rumah Sakit (RS) pada setiap unit pelayanan (%)	100	RSUD
		22 Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit(%)	8,48	RSUD
		23 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani(%)	90	DINAS KESEHATAN
		24 Prevalensi balita gizi buruk	< 1	DINAS KESEHATAN
		25 Cakupan desa siaga aktif (%)	50	DINAS KESEHATAN
		26 Pemasangan kontrasepsi KB (%)	78,85	DINAS KESEHATAN
		27 Akseptor KB (%)	78,85	DINAS KESEHATAN
		28 Peserta KB aktif (%)	76,3	DINAS KESEHATAN
		29 Kader bina ketahanan keluarga (%)	70,2	DINAS KESEHATAN

**Tabel II.8.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 8**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
8	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	1 Rasio posyandu per satuan balita (‰)	21,53	DINAS KESEHATAN
		2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0,37	DINAS KESEHATAN

**Tabel II.9.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 9**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
9	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	1 Kondisi ruang kelas SD/MI baik	76,5	DINAS PENDIDIKAN
		2 Kondisi ruang kelas SMP/MTs baik	90,55	DINAS PENDIDIKAN
		3 Kondisi ruang kelas SMA/SMK/MA baik	82,99	DINAS PENDIDIKAN

**Tabel II.10.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 10**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
10	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	1 Angka Melek Huruf	91,85	DINAS PENDIDIKAN
		2 Jumlah perpustakaan	115	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOK
		3 Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	21.550	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOK
		4 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	17.543	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOK
		5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	71,93	BAPPEDA & PM
		Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)		DINAS PENDIDIKAN
		6 APK SD/MI/Paket A	103,1	
		7 APK SMP/MTs/Paket B	97,17	
		8 APK SMA/SMK/MA/Paket C	67,74	
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)		DINAS PENDIDIKAN
		9 APK PAUD	42,67	
		10 APK TK	41,79	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		Angka Partisipasi Murni (APM) (%)		DINAS PENDIDIKAN
		11 APMSD/MI	98,89	
		12 APMSMP/MTs	82,14	
		13 APMSMA/SMK/MA/Paket C	54,21	
		Angka Putus Sekolah (APS) (%)		DINAS PENDIDIKAN
		14 SD/MI	0	
		15 SMP/MTs	0,13	
		16 SMA/SMK/MA	0,3	
		Angka Partisipasi Sekolah (%)		DINAS PENDIDIKAN
		17 Kelompok usia 7 – 12 tahun	99,99	
		18 Kelompok usia 13 – 15 tahun	88,54	
		19 Kelompok usia 16 – 18 tahun	67,59	
		Angka melanjutkan (%)		DINAS PENDIDIKAN
		20 Dari SD/MI ke SMP/MTs	99,93	
		21 Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	70,7	

**Tabel II.11.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 11**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
11	Meningkatnya pelayanan pendidikan	1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6,66	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru / murid		DINAS PENDIDIKAN
		2 SD	1:20	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		3 MI	1:15	
		4 SMP	1:20	
		5 MTs	1:15	
		6 SMA	1:20	
		7 SMK	1:15	
		8 MA	1:15	
		Nilai rata-rata ujian nasional		DINAS PENDIDIKAN
		9 SD/MI	6,81	
		10 SMP/MTs	7,2	
		11 SMA/SMK/MA	6,96	
		Angka kelulusan		DINAS PENDIDIKAN
		12 SD/MI	100	
		13 SMP/MTs	99,88	
		14 SMA/SMK/MA	97,65	
		Guru yang memenuhi kualifikasi akademik (%)		DINAS PENDIDIKAN
		15 SD/MI	70,36	
		16 SMP/MTs	92,5	
		17 SMA/SMK/MA	97,83	
		Guru yang bersertifikasi pendidik (%)		DINAS PENDIDIKAN
		18 SD/MI	51,78	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		19 SMP/MTs	46,97	
		20 SMA/SMK/MA	66,36	
		Sekolah yang memiliki akreditasi minimal B (%)		DINAS PENDIDIKAN
		21 SD	50,47	
		22 SMP	83,33	
		23 SMA	91	
		24 SMK	52,25	

**Tabel II.12.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 12**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
12	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK	595.179,46	DINAS TANPANG
		2 Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	376.094,99	DINAS TANPANG
		3 Kontribusi Produksi Perternakan terhadap PDRB ADHK	81.601,02	DINAS TANPANG
		4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	158,76	DINAS HUTBUN
		5 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	74.026,48	DINAS TAMBEN
		6 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,05	DINAS BUDPAR PORA
		7 Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB ADHK	184.864	DINAS KOPERINDAG
		8 Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK (jutaan rupiah)	62.953	DINAS KOPERINDAG

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		9 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) terhadap PDRB ADHK	104.938,28	DINAS HUTBUN
		10 Buku "PDRB Kabupaten"	ada	BALITBANGTIK
		11 Pertumbuhan PDRB ADHK (Milyar)	1.524	BAPPEDA & PM
		12 Pertumbuhan PDRB ADHB (Milyar)	3.161	BAPPEDA & PM
		13 Pertumbuhan ekonomi	6,56	BAPPEDA & PM
		14 Laju inflasi	4,99	BAPPEDA & PM
		15 PDRB per kapita (ribu)	5.644	BAPPEDA & PM
		16 Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	BALITBANGTIK
		17 Pertumbuhan Industri (%)	1,93	DINAS KOPERINDAG
		18 Nilai Tukar Petani	107,5	BAPPEDA & PM
		19 Produktivitas total daerah (juta)	1.434.303	BAPPEDA & PM
		20 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	10	DPPKA
		21 Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	1	DINAS KOPERINDAG
		22 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12	BAPPEDA & PM
		23 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	660	BAPPEDA & PM
		24 Rasio daya serap tenaga kerja	208,3	BAPPEDA & PM
		25 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0,07	BAPPEDA & PM
		26 Tehnologi Tepat Guna (TTG) diterapkan (%)	2,92	BAPEMAS & PEMDES

**Tabel II.13.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 13**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
13	Ketersediaan pangan daerah	1 Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	116	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		2 Penguatan cadangan pangan (%)	288,46	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		3 Ketersediaan pangan utama (ton)	97.677	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		4 Regulasi ketahanan pangan	ada (8)	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (%)	51,86	DINAS TANPANG
		6 Produksi perikanan (Ton)	5.626.449	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
		7 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	55,56	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		8 Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	92,3	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		9 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	87,2	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		10 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	636.075	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		11 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	1.244.059,08	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		12 Konsumsi ikan (Kg)	11,35	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
		13 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	64	KANTOR KETAHANAN PANGAN

**Tabel II.14.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 14**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
14	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	1 Koperasi aktif (%)	84,43	DINAS KOPERINDAG
		2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	5.632	DINAS KOPERINDAG
		3 Usaha Mikro dan Kecil (%)	55,06	DINAS KOPERINDAG
		4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	3,93	DINAS KOPERINDAG
		5 Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	0,99	DINAS KOPERINDAG
		6 Cakupan bina kelompok nelayan	46	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
		7 Jenis, kelas, dan jumlah restoran	5	DINAS BUDPAR PORA
		8 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	14	DINAS BUDPAR PORA
		9 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	0	BAPPEDA & PM
		10 Jumlah BPR/LKM (unit)	5.366	DINAS KOPERINDAG
		11 Jenis dan jumlah bank dan cabang	9	DINAS KOPERINDAG
		12 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	3	DINAS KOPERINDAG

**Tabel II.15.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 15**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
15	Pemasaran komoditas daerah	1 Jumlah pameran/expo produk unggulan dilaksanakan per tahun	7	DINAS KOPERINDAG
		2 Jumlah pameran/expo	4	DINAS BUDPAR PORA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		3 Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	556	DINAS KOPERINDAG
		4 Produksi perikanan kelompok nelayan	4.832.551	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
		5 Kunjungan wisata	512.274	DINAS BUDPAR PORA

**Tabel II.16.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 16**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
16	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	52,52	DINAS BINA MARGA
		2 Panjang jalan kabupaten dilalui roda 4 (m)	798.000	DINAS BINA MARGA
		3 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	450.022	DINAS BINA MARGA
		4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	314.052	DINAS BINA MARGA
		5 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	13.223	DINAS CKTK
		6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,3	DINAS CKTK
		7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00745	DINAS HUBKOMINFO
		8 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	7.361.200	DINAS HUBKOMINFO
		9 Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	337.500	DINAS HUBKOMINFO
		10 Proporsi jembatan dalam kondisi baik (%)	90,7	DINAS BINA MARGA
		11 Rumah tangga pengguna air bersih (%)	65,34	DINAS CKTK
		12 Rumah Tangga yang menggunakan air bersih(%)	65,34	DINAS CKTK

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		13 Penduduk berakses air bersih (%)	19,48	DINAS CKTK
		14 Rasio jaringan irigasi	0.0881	DINAS BINA MARGA
		15 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	3.526	DINAS BINA MARGA
		16 Jumlah jaringan komunikasi	36	DINAS HUBKOMINFO
		17 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	9:1.000	DINAS HUBKOMINFO
		18 Jumlah surat kabar nasional/lokal	3	DINAS HUBKOMINFO
		19 Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	DINAS HUBKOMINFO
		20 Jumlah rumah tangga pengguna listrik	87.027	DINAS TAMBEN
		21 Peningkatan fasilitas pasar daerah dan tradisional	36	DPPKA
		22 Permukiman layak huni (%)	97,44	DINAS CKTK
		23 Luas Permukiman (Ha)	13.323,75	DINAS CKTK
		24 Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,074	DINAS CKTK
		25 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	53,37	DINAS CKTK
		26 Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	DINAS CKTK
		27 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	50	KANTOR LH
		28 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,31	KANTOR LH
		29 Jumlah penegakan hukum lingkungan	50	KANTOR LH
		30 Ketaatan terhadap RTRW	55	DINAS CKTK
		31 Luas wilayah produktif	20,22	DINAS TANPANG
		32 Luas wilayah industri	10,8	DINAS KOPERINDAG

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		33 Luas wilayah banjir	10,27	DINA BINA MARGA
		34 Luas wilayah kekeringan	21,38	DINAS CKTK
		35 Luas wilayah perkotaan	9,5	DINAS CKTK
		36 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	5,54	DINAS HUTBUN
		37 Kerusakan Kawasan Hutan (%)	0,3	DINAS HUTBUN
		38 Jumlah ijin trayek	639	DINAS HUBKOMINFO
		39 Jumlah arus penumpang angkutan umum	7.361.200	DINAS HUBKOMINFO
		40 Jumlah uji KIR angkutan umum	4.181	DINAS HUBKOMINFO
		41 Jumlah pelabuhan laut/udara	3	DINAS HUBKOMINFO
		42 Jumlah Terminal Bis/sub terminal	7	DINAS HUBKOMINFO
		43 Jumlah Angkutan darat	81.383	DINAS HUBKOMINFO
		44 Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	1.720	DINAS HUBKOMINFO
		45 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	6 bln	DINAS HUBKOMINFO
		46 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Rp. 80.000	DINAS HUBKOMINFO
		47 Jumlah pemasangan rambu-rambu	537	DINAS HUBKOMINFO

**Tabel II.17.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 17**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
17	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	1 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	16,56	BAPEMAS & PEMDES



		2 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	100	BAPEMAS & PEMDES
--	--	--	-----	------------------

**Tabel II.18.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 18**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
18	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	1 Angka kriminalitas	185	SATPOL PP
		2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1	SATPOL PP
		3 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	5.313	BADAN KESBANG POLINMAS
		4 Rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,005	BADAN KESBANG POLINMAS
		5 Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	30,21	BADAN KESBANG POLINMAS
		6 Penegakan PERDA	0,69	SATPOL PP
		7 Cakupan patroli petugas Satpol PP	2	SATPOL PP
		8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	0,72	SATPOL PP
		9 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,001	BADAN KESBANG POLINMAS
		10 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	10	BADAN KESBANG POLINMAS
		11 Jumlah demo	2	SATPOL PP
		12 Angka kriminalitas yang tertangani	180	SATPOL PP
		13 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	8	BADAN KESBANG POLINMAS
		14 Kegiatan pembinaan politik daerah	4	BADAN KESBANG POLINMAS

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		15 Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya dan agama	18	DINAS BUDPAR PORA
		16 Jumlah grup kesenian	17	DINAS BUDPAR PORA
		17 Jumlah gedung kesenian	1	DINAS BUDPAR PORA
		18 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	38	DINAS BUDPAR PORA
		19 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	266	DINAS BUDPAR PORA
		20 Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Kabupaten	24	DINAS BUDPAR PORA
		21 Jumlah sarana peribadatan dan keagamaan yang mendapat pembinaan	240	DINAS SOSNAKERTRANS
		22 Jumlah jenis olah raga berprestasi	11	DINAS BUDPAR PORA
		23 Jumlah Klub Olahraga	80	DINAS BUDPAR PORA
		24 Jumlah gedung olahraga	4	DINAS BUDPAR PORA
		25 Jumlah organisasi pemuda	12	DINAS BUDPAR PORA
		26 Jumlah organisasi olahraga	17	DINAS BUDPAR PORA
		27 Jumlah kegiatan kepemudaan	18	DINAS BUDPAR PORA
		28 Jumlah kegiatan olahraga	22	DINAS BUDPAR PORA
		29 Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	176	DINAS BUDPAR PORA
		30 Jumlah lapangan olahraga	157	DINAS BUDPAR PORA

**Tabel II.19.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 19**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
19	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	1 Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	6,8	DINAS SOSNAKERTRANS
		2 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	36,1	BADAN KBPP
		3 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	8	DINAS SOSNAKERTRANS
		4 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)	6,8	DINAS SOSNAKERTRANS
		5 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	55,3	BADAN KBPP
		6 Kekerasan Dalam Rumah Tangga(%)	12,38	BADAN KBPP
		7 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	50,31	BADAN KBPP
		8 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	33,15	BADAN KBPP
		9 Jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	25,47	BADAN KBPP
		10 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56,51	BADAN KBPP
		11 Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	2,2	BADAN KBPP
		12 Rasio penduduk yang bekerja	0,9868	DINAS SOSNAKERTRANS
		13 Angka partisipasi angkatan kerja (%)	69,6	DINAS SOSNAKERTRANS
		14 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	5	DINAS SOSNAKERTRANS
		15 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,88	DINAS SOSNAKERTRANS
		16 Pencari kerja yang ditempatkan (%)	23,7	DINAS SOSNAKERTRANS

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
		17 Angka Pengangguran Terbuka	1,27	DINAS SOSNAKERTRANS
		18 Jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan	16	DINAS SOSNAKERTRANS
		19 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	DINAS SOSNAKERTRANS
		20 Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (%)	33,33	BAPEMAS & PEMDES
		21 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	100	BAPEMAS & PEMDES
		22 LPM Berprestasi (%)	0	BAPEMAS & PEMDES
		23 PKK aktif (%)	100	BAPEMAS & PEMDES
		24 Transmigran swakarsa (orang)	10	DINAS SOSNAKERTRANS
		25 Rasio lulusan S1/S2/S3 (Ketenagakerjaan)	337	DINAS SOSNAKERTRANS
		26 Rasio ketergantungan (Ketenagakerjaan)	0,5	DINAS SOSNAKERTRANS
		27 Penduduk Miskin (%)	16,39	BAPPEDA & PM
		28 Jumlah penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	4	SATPOL PP

## F. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka disusunlah Penetapan Kinerja Kabupaten Pacitan, yang merupakan ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011.

Penetapan Kinerja merupakan pelaksanaan dari DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011. Penetapan kinerja tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Karena Tahun 2011 merupakan masa transisi antara RPJMD tahun 2008-2011 dengan RPJMD tahun 2011-2016 maka disusun juga Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2011 untuk menjembatani kedua RPJMD dimaksud.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.